

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



Oleh:

DIDO PETO SIFARIF

2005/67611

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN AGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KOTA PADANG (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)

Nama : DIDO PETO SIFARIF
NIM/ BP : 67611/ 2005
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN AGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KOTA PADANG (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)

Nama : DIDO PETO SIFARIF
NIM/ BP : 67611/ 2005
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. _____
2. Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. _____
3. Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. _____
4. Anggota	Nelvirita, SE, M.Si, Ak	4. _____

ABSTRAK

Dido Peto Sifarif : Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2010.

Pembimbing : I. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
II. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang (2) Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang (3) Pengaruh umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang (4) Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang (5) Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode acak sederhana, sebanyak 62 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarluaskan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah, (2) Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja aparat pemerintah, (3) Umpam Balik Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah, (4) Evaluasi Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah, (5) Kesulitan Tujuan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah.

Dalam penelitian ini disarankan agar aparat pemerintah daerah lebih meningkatkan partisipasi dalam penganggaran sehingga akan tampak jelas sasaran yang akan dicapai dan agar kesulitan pencapaian sasaran anggaran bisa teratasi dengan banyaknya usulan-usulan dan saran-saran dalam melakukan evaluasi terhadap anggaran. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak , selaku pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak, selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa angkatan 2005 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL	
DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	13
2. Indikator Kinerja	17
3. Penganggaran di Sektor Publik	17
4. Proses Penyusunan Anggaran di Sektor Publik	22
5. <i>Budgetary Goal Characteristic</i>	24
B. Kajian Riset Sebelumnya	32
C. Pengembangan Hipotesis	33

D. Kerangka Konseptual	34
E. Hipotesis	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis Data, dan Sumber Data,	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya	39
F. Instrumen Penelitian	41
G. Uji Valliditas dan Realibilitas	43
H. Uji Asumsi Klisik	46
I. Teknik Analisis Data	48
J. Definisi Operasional	51
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Demografi Responden	56
C. Deskripsi Hasil Penelitian	58
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	68
E. Stalistik Deskriptif	70
F. Uji Asumsi Klasik	71
1. Uji Normalitas Residual	72
2. Uji Multikolinearitas	73
3. Uji Heterokedastisitas	74

G. Hasil Uji Model.....	75
H. Pembahasan.....	81
BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Keterbatasan dan Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Skor Jawaban Pertanyaan Berdasarkan Sifat	40
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	42
3. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Pilot Test	44
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Pilot Test.....	45
5. Tingkat Pengembalian Kuesioner	56
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
7. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	57
8. Distribusi Frekuensi Partisipasi Anggaran	59
9. Distribusi Frekuensi Kejelasan Tujuan Anggaran	60
10. Distribusi Frekuensi Umpan Balik Anggaran	62
11. Distribusi Frekuensi Evaluasi Anggaran.....	63
12. Distribusi Frekuensi Kesulitan Tujuan Anggaran.....	65
13. Distribusi Frekuensi Kinerja Aparat	67
14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Data Penelitian	69
15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Data Penelitian.....	69
16. Statistik Deskriptif	70
17. Uji Normalitas Residual.....	72
18. Uji Multikolinearitas	73
19. Uji Heterokedastisitas	74
20. Uji F	75
21. Koefisien Determinasi	76

22. Koefisien Regresi Berganda.....	76
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	93
2. Uji Asumsi Klasik Pengujian Model	105
Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	
Format Kuesioner	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 32/2004). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari reformasi keuangan negara dan daerah.

Proses perencanaan daerah perlu diimbangi oleh beberapa hal seperti : kapasitas aparatur pemerintah, sumberdaya manusia maupun sumber dana. Berdasarkan hal itu, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang diinginkan perlu dilakukan evaluasi atas kinerja.

Dengan melakukan penilaian kinerja terhadap individu aparatur, idealnya akan dapat diketahui tingkat kontribusi seorang pegawai terhadap unit kerja atau tingkat kontribusi unit kerja terhadap organisasi secara keseluruhan. Dalam penilaian

ini, titik berat lebih ditekankan kepada hasil atau capaian yang diperoleh dibandingkan dengan perilaku kerja. Penilaian ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi.

Menurut Mangkunegara (2001:2) kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor : keahlian dan kemampuan diri pegawai itu sendiri, motivasi kerja, komunikasi kerja, disiplin kerja, upah, gaji dan pendidikan. Dalam pemerintahan, keberadaan dan peran pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan program pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting. Pegawai dituntut untuk bekerja dengan giat serta mendayagunakan segala kemampuannya sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Pegawai sebagai salah satu sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kualitas kerja yang memadai, professional dan kreatif. Beberapa faktor yang menentukan kualitas pegawai, yaitu tingkat kecerdasan, bakat, sikap kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik, etos dan disiplin kerja. Kualitas seperti inilah yang menjadi andalan bagi negara – negara maju. Namun hal ini berbeda dengan pegawai di Indonesia. Jika dilihat dari struktur pendidikan, posisi tenaga kerja Indonesia kurang menguntungkan, karena sebagian memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta didukung dengan kualitas kerja dan disiplin yang dinilai masih kurang.

Kinerja yang baik tercipta dari adanya kegiatan atas penyelesaian tugas secara optimal, sedangkan kerja yang optimal terlaksana apabila pegawai dapat menggunakan kemampuan, pengetahuan dan bakatnya serta memanfaatkan waktu

sebaik mungkin. Selain itu penulis melihat secara kasat mata bahwa pegawai di beberapa bagian masih terlihat kurang memanfaatkan waktu kerja yang ada untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Kinerja manajerial merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Kenis dalam Philipus (2009) menyimpulkan bahwa variasi dalam penyusunan anggaran manajer tingkat atas seperti yang direfleksikan dalam karakteristik tujuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dari manajer tingkat bawah.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005; 61). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action*

untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dahulu penganggaran dalam sektor publik dilakukan dengan system top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan sehingga bawahan anggaran hanya melaksanakan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). RASK / RAK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. RASK / RAK memuat juga standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. RASK / RAK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama, Sarjito dalam Dafid (2010).

Menurut Kenis dalam Philipus (2009) adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Target anggaran yang

disusun sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi sehingga dapat memberikan suatu tingkat kepuasan. Dengan demikian, karakteristik tujuan anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparatur pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sesuai kebijakan umum APBD. Karakteristik tujuan anggaran atau *budgetary goal characteristics (BGC)* terdiri dari partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan sasaran anggaran.

Partisipasi adalah bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Mardisamo, 2004:55). Hal ini merupakan proses pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara dalam sudut pandang partisipasi dan kesadaran. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran dalam Kepmendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Dengan adanya penjaringan aspirasi masyarakat dan keterlibatan staf-staf dalam persiapan penyusunan anggaran, maka anggaran yang dibuat pada masing-masing unit kerja akan menjadi jelas tujuannya, mempunyai nilai manfaat bagi

masyarakat, serta dapat digunakan untuk memotivasi karyawan dalam memperbaiki kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah mengalami kesulitan dalam menyusun target-target anggaran. Menurut Kenis dalam Ehrman (2006), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, individu akan terbantu dalam melaksanakan penyusunan target anggaran, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Umpaman balik terhadap tingkat dimana sasaran dicapai merupakan suatu variable motivasional yang penting. Becker dan Green dalam Octavianus (2002) menyatakan apabila anggota suatu organisasi tidak dapat mengetahui hasil yang mereka capai, mereka tidak akan mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan dan tidak memberikan insentif pada kinerja yang tinggi, yang pada akhirnya mereka tidak mengalami kepuasan. Jika anggota memperoleh umpan balik terhadap yang telah dilakukan, maka mereka akan melakukan perbaikan terhadap

kesalahan yang ada dan melakukan peningkatan kualitas terhadap hasil positif yang diperoleh. Contoh umpan balik yang positif adalah ketika manajemen lini tengah atau bawah menerima pujian, promosi atau *reward* yang maksimal terhadap kinerja yang telah dicapainya. Jika terjadi umpan balik yang merugikan maka manajer tersebut tidaklah dihukum tetapi harus dibimbing untuk memperbaiki hasil yang telah dicapai.

Evaluasi anggaran ditujukan agar anggaran digunakan untuk memonitor pelaksanaan dan mengukur sejauh mana kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, dan menilai apakah pelaksanaan terarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, laporan pelaksanaan harus disediakan secara teratur dan lengkap, berisikan hasil pelaksanaan dan anggarannya untuk setiap item. Informasi yang dilaporkan harus dipisahkan antara yang *controllable* dan *uncontrollable* bagi seorang pimpinan tertentu. Adanya laporan pelaksanaan tersebut akan memudahkan para pimpinan mengevaluasi hasil yang telah dicapai, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar pelaksanaan tetap terarah ke sasaran anggaran. Prestasi setiap pimpinan atau bawahan harus dinilai secara teratur berdasarkan tingkatan anggaran yang dicapainya.

Evaluasi yang dilakukan secara periodik menjadi proses pengendalian anggaran dan hasil evaluasi anggaran menjadi umpan balik bagi pelaksana anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajemen. Evaluasi anggaran yang cocok adalah tidak mendasarkan pada varian anggaran yang membandingkan antara realisasi dan target anggaran tetapi lebih ditekankan pada proses pencapaian anggaran. Untuk anggaran yang relatif sulit dicapai sebaiknya menggunakan evaluasi anggaran yang

berbasis pada proses pencapaian sedangkan anggaran yang relatif mudah dicapai dapat menggunakan evaluasi varian anggaran. Jika evaluasi anggaran disesuaikan dengan tingkat kesulitan sasaran anggaran, maka diprediksikan dapat menumbuhkan kepuasan kerja.

Kesulitan tujuan anggaran adalah range dari “sangat longgar dan mudah dicapai” sampai “sangat ketat dan tidak dapat dicapai”. Menurut Kenis dalam Munawar (2006) tujuan anggaran yang terlalu ketat secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, yang nantinya akan berakibat terhadap kinerja yang buruk. Kesulitan tujuan anggaran yang biasanya tejadi pada pemerintahan daerah adalah dalam penetapan rencana anggaran yang melebihi plafon anggaran.

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam suatu organisasi dengan membandingkan hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran.

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Nordiawan, 2007). Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika bawahan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Faktor perilaku mencakup kebiasaan kerja aktual seperti ketekunan, tingkat absensi, kinerja dan sebagainya (Uma Sekaran, 2006:80).

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program tersebut. Jika dilihat dari alat ukur finansial berupa anggaran, masih terdapat ketidak tepatan dalam menentukan input, yang pada akhirnya tidak menunjukkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Faktanya, di dunia pendidikan terdapat pemborosan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2010. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, biaya pelaksanaan UN 2010 melonjak tajam dari Rp. 483.000.000.000,00 hingga Rp. 592.000.000.000,00. Ini tidak berbanding lurus terhadap output yang dihasilkan, buktinya angka kelulusan UN tingkat SMA dan sederajat menurun 4.97% dari 94.85% (2009) menjadi 89.88% (2010) (sumber: Media Indonesia). Untuk itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi anggaran terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan mencari jalan keluar terhadap kesulitan tujuan anggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta meningkatkan partisipasi dalam penyusunan anggaran hingga jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Munawar (2006) yang meneliti tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah menemukan bahwa hanya partisipasi dan umpan balik berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sedangkan menurut Philipus (2009), yang menyatakan karakteristik tujuan anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah, namun sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta perbedaan hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk kembali meneliti sejauhmana peran aparat pemerintah kota Padang dalam memberlakukan anggaran daerah jika dikaitkan dengan karakteristik tujuan anggaran (*Budgetary Goal Characteristic*), dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Sejauh mana pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang ?
2. Sejauh mana pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang ?
3. Sejauh mana pengaruh Umpam Balik terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang ?
4. Sejauh mana pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang ?
5. Sejauh mana pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.
2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.
3. Pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.
4. Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.
5. Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang, juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
3. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Padang pada instansi pemerintah kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang
3. Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang
4. Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang
5. Kesulitan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Padang

B. Keterbatasan dan Saran

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Responden penelitian terbatas pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika Responden melibatkan keseuruhan aparat pemerintah yang terkait dalam penganggaran.

2. Kuesioner yang peneliti sebarkan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuesioner peneliti hanya menggunakan pernyataan yang bersifat normatif. Sehingga ini menyebabkan responden di arahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini diantaranya:

1. Dalam penganggaran, seluruh pendapat dan partisipasi yang disampaikan oleh setiap aparat pemerintah sebaiknya diremukkan dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran agar tujuan anggaran dapat tercapai.
2. Kejelasan sasaran anggaran harus lebih diperjelas lagi dan dibuat spesifik bagi pelaksana anggaran agar sasaran yang dicapai pun terlihat jelas.
3. Dalam penyusunan anggaran hendaknya atasan banyak memberikan umpan balik mengenai sasaran di bagian tersebut, adanya pengarahan atas perbaikan-perbaikan yang terjadi, serta adanya pemantauan secara terus-menerus oleh atasan agar dapat mencapai tujuan anggaran.
4. Ketika anggaran sedang dilaksanakan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan.

5. Untuk mengatasi kesulitan tujuan anggaran sebaiknya ketika menyusun RASK dibolehkan membuat rencana kerja baru yang sesuai dengan kemampuan aparat pemerintah sehingga mampu meningkatkan kinerja aparat.

DAFTAR PUSTAKA

Andarias, Bagus. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi. *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Bambang, Sardjito. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.. *SNA X*. Makassar.

Dafid, Septianto. 2010. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta.

Deddi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Dwi, Kartika Ningrum. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Padang

Ehrmann, Suhartono. 2006. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *SNA 9 PADANG*. Yogyakarta

Ida, Ayu dan I Ketut. 2008. *Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Kinerja Manajerial Ada Rumah Sakit Pemerintah Di Kota Denpasar*

Imam Ghazali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Kenis, Izzetin, “*Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*”, *The Accounting Review*, Oktober 1979, pp. 707-721.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.